# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

## 2.1 Sejarah Singkat PT. Pos Indonesia(PERSERO)

Dinas Pos sudah berdiri dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu dari sejak masa penjajahan hingga pada masa reformasi ini. Dalam jangka waktu tersebut, PT. Pos Indonesia (PERSERO) telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sehingga menjadikannya salah satu perusahaan yang cukup diperhitungkan dan memegang andil yang besar dalam kehidupan Bangsa Indonesia. Adapun perkembangan dinas pos dapat dibagi kedalam beberapa masa.

**1.Masa VOC (1700-1808)**

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada akhir abad 15 M menandai babak baru sejarah pos di Indonesia. Ditandai dengan masuknya kapal-kapal laut Belanda pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan De Keyser di daerah Banten. Pada masa ini, pengiriman surat-surat dari wilayah luar ke Indonesia hanya dilakukan melalui jalur laut dengan jadwal yang tidak pasti. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Agustus 1746, didirikanlah kantor pertama yang berkedudukan di Batavia oleh Jendral G.W Baron Van Imhoff agar pengiriman surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Pulau Jawa dapat terjamin keamanannya.

Setelah itu, barulah pada tahun 1754, proses pengiriman surat menjadi lebih teratur, yaitu selama 2 minggu sekali dengan menggunakan jalur darat. Keadaan

ini berlangsung terus selama *Bataafche Republiek* berkuasa dalam kurun waktu 8 tahun (1800-1808).

**2. Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811)**

Pada masa ini, Daendels mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dinas pos, yaitu membagi Pulau Jawa kedalam beberapa distrik, yakni: Banten, Batavia, Surabaya dan Semarang.

Setiap distrik dikepalai oleh seorang *Commisaris der Wegen en Posterijn* yang menempati sebuah *General Post Kantoor* atau Kantor Pos Wilayah dan membawahi beberapa *Profekturan* atau Kantor Pos Kecil.

Kemudian, sistem pengantaran surat itu sendiri dilakukan oleh seorang *Postillons* atau Tukang Pos Berkuda.

**3. Masa Pemerintahan Raffles (1811-1816)**

Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda dan mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa di wilayah Indonesia. Pada masa ini, Raffles mengeluarkan kebijakan mengenai peraturan biaya porto untuk surat kabar dan barang cetakan (*Regulation For The Post Eshtablishment on The Island of Java)* disamping melakukan berbagai macam pembaharuan di Indonesia.

**4.Masa Pemerintahan Belanda (1816-1942) hingga Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)**

Setelah ditandatanganinya Perjanjian London pada tahun 1815, maka secara otomatis, Inggris mengembalikan Indonesia kedalam pelukan Pemerintah Belanda.

Setelah mendapat otorisasi-nya kembali atas Indonesia, Pemerintah Belanda mengadakan beberapa pembaharuan di dalam tubuh Dinas Pos, antara lain:

(1836) Pengangkutan pos dimulai dengan mempergunakan Kereta Api *Express* malam rute Batavia-Surabaya.

(1864) Perubahan bentuk usaha Dinas Pos menjadi Jawatan.

(1875) Digabungkannya Dinas Pos dengan Dinas Telegraph dengan nama *Post en Telegraaf Dienst* yang berada dibawah Departemen Pekerjaan Umum atau *Department der Burgerlijkke Openbae Werkn.*

(1884) Munculnya *Post Telegraaf en Telefoondienst* (PTT) yang merupakan gabungan dari Jawatan Telepon dan Jawatan Pos dan Telegraph.

(1931) Diubahnya status Jawatan PTT menjadi Perusahaan Negara (PN) Postel berdasarkan ordinasi, tepatnya pada tanggal 28 Desember 1931.

Sedangkan pada masa Pendudukan Jepang, tidak dicatat adanya pembaharuan yang cukup berarti.

**5. Masa Kemerdekaan Hingga Saat Ini**

Pada kurun waktu 1945-1950, situasi politik Indonesia diramaikan dengan terjadinya berbagai pergolakan dalam rangka merebut kedaulatan dari tangan Jepang disertai timbulnya Agresi Militer Belanda I dan II yang cukup memanaskan situasi di Tanah Air.

Hal ini tentu saja mengganggu kelancaran aktivitas Dinas Pos dengan adanya pemindahan perangkat komunikasi, pembakaran sarana dan prasarana pos serta terganggunya sarana perhubungan pos dan telegraph.

Setelah keadaan berangsur-angsur membaik, maka pada tanggal 6 Juli 1965, PN Postel dipecah kedalam dua lembaga, yakni PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi yang disyahkan oleh Pemerintah dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1965.

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1969, Pemerintah menetapkan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perjan, Perum dan Persero.

Oleh karena itu, status PN Pos dan Giro kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1978. Sejak itu, Perum Pos dan Giro adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di dalam ruang lingkup Departemen Pos dan Telekomunikasi (Deparpostel) yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (Menparpostel).

Oleh karena itu, tugas pokok Perum Pos dan Giro untuk mengembangkan pelayanan dalam bidang lalu lintas berita, informasi tertulis, barang dan uang untuk menunjang kelancaran hubungan masyarakat dan menunjang terlaksananya Pembangunan Nasional. Maka, pada tanggal 27 Februari 1995, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 1995, Perum Pos dan Giro berubah status menjadi PT. Pos Indonesia (PERSERO) yang kemudian disyahkan pada tanggal 20 Juni 1995.

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (PERSERO) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) No. 189/DIRUT/1995, tanggal 18 Oktober 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Usaha Pos tanggal 7 November 1995.

Adapun Organisasi PT.Pos Indonesia (PERSERO) disusun dalam dua tingkatan, yakni:

**1. Organisasi Tingkat Pusat**, terdiri dari:

A. Direksi

- Direktorat Operasi
- Direktorat Sumber Daya Manusia
- Direktorat Keungan
- Direktorat Perencanaan, Tekhnik dan Sarana
- Direktorat Pengawasan Intern
- Sekretariat Perusahaan
- Pusat Perencanaan dan Penelitian Terapan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT)

B. Pimpinan

Pimpinan PT. Pos Indonesia (PERSERO) adalah Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) sebagai satu kesatuan yang terdiri dari:

- Direktur Utama selaku Ketua
- Direktur Operasi selaku Anggota
- Direktur Pemasaran selaku Anggota

- Direktur SDM selaku Anggota
- Direktur Keuangan selaku Anggota

**2. Organisasi Tingkat Daerah**

PT. Pos Indonesia (PERSERO) membagi wilayah kerjanya menjadi 11 Wilayah Usaha Pos (Wilpos) yang terdiri dari:

- Wilayah Pos I Medan
- Wilayah Pos II Padang
- Wilayah Pos III Palembang
- Wilayah Pos IV Jakarta
- Wilayah Pos V Bandung
- Wilayah Pos VI Semarang
- Wilayah Pos VII Surabaya
- Wilayah Pos VIII Denpasar
- Wilayah Pos IX Banjar Baru
- Wilayah Pos X Makassar
- Wilayah Pos XI Jayapura

## 2.3 Deskripsi Jabatan

Berikut ini adalah uraian tugas-tugas yang diemban bagian-bagian Struktur Organisasi yang berhubungan dengan judul Laporan Kerja Praktek penulis:

**1. Direktorat Keuangan**

- Mengawasi proses pembukuan beserta laporannya yang dalam prakteknya dibantu oleh para Manajer di tiap bagian.
- Memeriksa kebenaran penyusunan neraca kasir, kas serta buku bantuannya beserta laporan keuangan tahunan di akhir dinas
- Memantau stok BPM dengan buku bank lainnya.

**2. Sub Direktorat Perbendaharaan dan Verifikasi**

**A. Bagian Perbendaharaan**

- Memeriksa kebenaran antara bukti pemasukan dengan jumlah uang yang ada.
- Mengkoordinasikan jumlah uang yang diterima dari tiap bagian yang ada ke bagian verifikasi.

**B. Bagian Verifikasi**

- Melaksanakan prosedur dan pertanggungjawaban keuangan, keabsahan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan.
- Mengendalikan likuiditas keuangan perusahaan
- Menyusun neraca harian perusahaan.
- Melaporkan hasil penyusunan neraca harian ke bagian akuntansi.

## 2.4 Aspek Kegiatan PT. Pos Indonesia (PERSERO)

Sebagai BUMN yang bergerak dibidang pelayanan jasa, PT. Pos Indonesia (PERSERO) mempunyai beberapa fungsi pokok, misalnya: menyelenggarakan

jasa pos dan giro untuk umum, baik dalam maupun luar negeri yang meliputi jasa pos dan giro, keagenan, dan lain-lain.

Berdasarkan sifat media penyimpanannya, usaha pokok meliputi:

**1.Layanan Fisik**, meliputi:

- Layanan Surat Pos
- Layanan Paket Pos
- Layanan Keuangan, meliputi:
  - Layanan Wesel Pos
  - *Speed Cash*; merupakan pengiriman uang secara cepat dari Saudi Arabia dan Malaysia.
  - *Western Union Money Transfer*; bekerja sama dengan Western Union, PT. Pos Indonesia (PERSERO) menyelenggarakan cara cepat mengirimkan uang secara timbal balik dari dan keseluruh dunia.
- Layanan Filateli; dalam upaya meningkatkan kualitas dan memperkaya khasanah hobi masyarakat yang kini ditangani dalam satu divisi agar lebih fleksibel dan akrab, serta bertujuan untuk menampung aspirasi pengunjung yang dibentuk pada tanggal 30 Oktober 1998 dengan nama 'Klub Benda 30'.

**2. Layanan Elektronik dengan Wasantara-Net** sebagai tulang punggung Jaringan Sistem Informasi Nasional yang dikelola oleh PT. Pos Indonesia (PERSERO), disediakan bagi masyarakat luar untuk memperoleh data pertukaran informasi secara elektronik dengan fasilitas-fasilitas:

A.Internet, yakni: layanan dengan efisiensi tinggi yang memberikan akses kepada informasi global.

- Surat Elektronik (E-Mail)
- Kotak Pos Elektronik
- Warung Pos Elektronik (Warposnet)
- Intranet untuk jaringan korporasi

B. *Elektronik Data Interchange* (EDI) untuk membangun jaringan komunikai antar berbagai data, antara lain: Eko-net, Sosio-net, Agro-net , Sekolah terbuka, Perpustakaan terbuka dan sebagainya.

C. *Hybride Mail,* meliputi:

- Surat Bisnis Elektronik
- Direct Mail
- Weselpos Elektronik
- Advantensi Elektronik

**3. Aktifitas Penunjang**, yakni jasa keagenan yang merupakan layanan keuangan dengan melaksanakan kerjasama jasa keagenan dengan berbagai instansi, seperti:

- Penyewaan ruang dan tempat
- Usaha transportasi
- Bank pos
- Belanja lewat pos
- Berbagai layanan keagenan lainnya.